



Judul : Jelang tahun politik, cegah serangan siber, anggaran BSSN minim
Tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Jelang Tahun Politik Cegah Serangan Siber, Anggaran BSSN Minim

ANGGOTA Komisi I DPR Christina Aryani mengingatkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiap menghadapi potensi serangan siber. Pasalnya, negara sedang menyelesaikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. BSSN harus melakukan mitigasi agar kebocoran sekaligus manipulasi data tidak terjadi.

“Masuk ke tahun politik dan pemilu ini harus selalu diwaspadai. Tahapannya sudah berjalan. Nah, ancaman serangan siber mungkin terjadi terhadap sistem informasi digital yang digunakan dalam proses tahapan pemilu,” ucap Christina dalam rapat dengan Kepala BSSN Hinsa Siburian di DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Politisi Partai Golkar itu menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang belum memberikan pagu anggaran yang cukup untuk BSSN. Berdasarkan informasi yang diterimanya, BSSN memperoleh anggaran pengamanan siber dan sandi untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 206 miliar.

Sebab itu, dia mendorong sekaligus mendukung BSSN untuk mengupayakan peningkatan anggaran tersebut agar potensi yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Dia juga mengingatkan BSSN, agar tetap menyusun langkah efektif dan efisien jika peningkatan anggaran tidak terpenuhi.

Senada, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mempertanyakan sikap Pemerintah yang belum mendukung BSSN untuk bekerja melindungi data digital.

Dia tidak ingin BSSN menjadi kambing hitam saat serangan siber terjadi. Padahal

anggaran BSSN belum cukup melindungi negara dari potensi kerusakan tersebut.

“Dengan anggaran hanya segini, bagaimana melindungi transaksi digital yang terjadi atau menjamin keamanan data? Kalau mau serius meningkatkan kemampuan teknologi, harus ada jaminan investasi terhadap (lembaga) pemerintah dalam membangun jaringan internet yang aman,” jelasnya.

Karena itu, dirinya berharap segenap Pemerintah saling mendukung memperkuat infrastruktur pendukung, SDM, sekaligus memperkuat otoritas. Jadi, kasus kebocoran maupun manipulasi data dalam ranah digital bisa diantisipasi dan tidak terulang kembali pada masa mendatang.

Senada, anggota Komisi I DPR Sturman Panjaitan mendukung tambahan anggaran sebesar Rp 641 miliar yang diajukan BSSN. Tambahan anggaran tersebut, dibutuhkan BSSN untuk meningkatkan keamanan siber.

“Saya kira ini harus dipenuhi (tambahan anggaran BSSN Rp 651 miliar). Kasihan ini ada ancaman yang 10 (poin ancaman siber) tapi kemampuan (anggarannya) sedikit. Orang Medan bilang ‘kek mana’ ini kan gitu nggak mungkin, nggak bisa dilakukan (mitigasi ancaman siber) kalau begini caranya (kurangnya anggaran),” ujar Sturman.

Dia menilai, penguatan keamanan siber perlu didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga usulan tambahan anggaran tersebut sangat realistis melihat banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam memitigasi risiko kejahatan siber. ■ KAL